

ABSTRAK

Sektor Jasa konstruksi memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional sebuah negara. Sebagai salah satu sektor penting pemerintah berupaya memberikan kemudahan pada pihak yang terlibat dalam sektor jasa konstruksi yaitu Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam mengurus perizinan. Melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dilaksanakan melalui PP No 5 tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan berlakunya aturan tersebut ternyata terdapat perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan aturan yang lama. Dengan banyaknya perubahan ternyata tidak semua Badan Usaha Jasa Konstruksi diwajibkan melakukan registrasi baru. Hanya BUK yang melakukan registrasi baru dan yang melakukan perpanjangan perizinan dengan, masa aktif yang telah habis per akhir tahun 2021 saja. Apabila di bawa dalam ranah lelang penyedia jasa konstruksi milik pemerintah pemilik perizinan lama dan baru dapat mengikuti kegiatan lelang. Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah: Apakah ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kegiatan lelang pasca berlakunya aturan baru terkait kualifikasi pengajuan perizinan SBU Konstruksi. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran solusi terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat ada ketidakadilan pada penetapan besaran nilai lelang paket proyek; terdapat ketidaksetaraan dalam kegiatan lelang, dimana tidak ada perbedaan SBU dalam tender atau lelang, maka antara BUK yang bertanding dalam lelang dianggap tidak memiliki kesamaan kualifikasi atau tidak setara; terdapat ketidaksetaraan dalam penerapan peraturan, dimana sesuai dengan indikator dalam konsep kesetaraan; dan dalam berlakunya aturan hingga dampaknya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip lelang. Disarankan mempertimbangkan kembali besaran nilai paket proyek, agar dapat terjangkau bagi seluruh BUK dan Memberikan perbedaan bagi BUK yang memiliki SBU dengan Standar kualifikasi terbaru agar dapat menciptakan keadilan.

Kata Kunci: *Asas Keadilan, Kesetaraan, Aturan Hukum, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lelang/Tender, Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha.*

ABSTRACT

The construction services sector has an important role in the national development of a country. As one of the important sectors, the government seeks to provide convenience to parties involved in the construction services sector, namely Construction Services Business Entities in licensing management. Through Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which is then implemented through PP No. 5 of 2021, the Implementation of Risk-Based Business Licensing. With the enactment of these rules, it turns out that there is a significant improvement when compared to the old rules. With so many changes, not all Construction Services Businesses are required to do new registrations. Only BUK conducts new registrations and who renews permits with, the active period that has expired as of the end of 2021 only. If brought in the realm of auction, government-owned construction service providers who own old and new permits can participate in auction activities. The issues that are the focus of the study in this study are: Whether there are inequalities and injustices in other activities after the enactment of the new rules related to the qualifications for applying for SBU Construction permits. This type of research is research using the normative juridical approach method. This research is carried out through a literature study, where the materials or data obtained will be compiled systematically and the research results are expected to be able to answer the problems studied, and in the end will be able to provide suggestions for solutions to these problems. The results of this study show that, there is an injustice in determining the amount of auction value of the project package; there is an inequality in auction activities, where there is no differentiator of SBU in tenders or auctions, then between the competing BUK. in the auction it is considered that it does not have a similarity of qualifications or is unequal; there is an inequality in the application of the regulations, where corresponds to the indicators in the concept of equality; and in the application of the rules to their effect, not in accordance with the principles of auctions. It is recommended to reconsider the value of the project package, so that it can be affordable for all BUKs and Provide a differentiator for BUKs that have SBU with the latest qualifications in order to create fairness.

Keywords: Principles of Fairness, Equality, Rule of Law, Risk-Based Business Licensing, Auction/Tender, Construction Services, Entity Certificates.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Metode Pendekatan	11
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.5 Metode Analisis Data	14
BAB II	16

PERLELANGAN JASA KONSTRUKSI	16
2.1 Perizinan Berusaha	16
2.1.2 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	19
2.1.3 Perizinan Jasa Konstruksi.....	20
2.2 Perlelangan Jasa Konstruksi	22
2.3 Kesetaraan.....	26
2.4 Asas Keadilan	27
BAB III.....	30
KETIDAKSETARAAN DAN KETIDAKADILAN DALAM KEGIATAN LELANG PASCA BERLAKUNYA ATURAN BARU TERKAIT KUALIFIKASI PENGAJUAN SBU KONSTRUKSI.....	30
3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terkait Kualifikasi Pengajuan SBU Konstruksi	30
3.2 Asas Keadilan dan Kesetaraan dalam Kegiatan Lelang Pasca Pemberlakuan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terkait Kualifikasi Pengajuan SBU Konstruksi	41
BAB IV.....	50
PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
BIODATA PENULIS.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Kualifikasi terkait Pengajuan SBU	3
Tabel 1.2 Keaslian Penelitian.....	6
Tabel 1.3 Daftar Informan	14
Tabel 2.1. Kualifikasi terkait Pengajuan SBU Konstruksi.....	35
Tabel 3.1. Perbandingan Kualifikasi terkait Pengajuan SBU.....	42
Tabel 3.2. Perbandingan Prinsip dan Pelaksanaan Lelang	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Alur Pengajuan SBU Konstruksi.....	38
Gambar 3.2. Persyaratan Kualifikasi Tender.....	45

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Alur Pengajuan SBU Konstruksi.....	37
---	----